



Politik Patronase dan Klientelisme Purnawirawan Tni Pada Pemilu Legislatif

Teguh Anggoro

STISIP Bina Putra Banjar, Jawa Barat, Indonesia

*Korespondensi email: goeh_an77@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya purnawirawan TNI yang menjadi Caleg di DPRD Kota Banjar, Jawa Barat. Pola patronase dan klientelisme masih menjadi idola para purnawirawan untuk mendulang suara. Mereka masih terjebak pada pola patronase dan klientelisme yang banyak dimainkan oleh politisi sipil lainnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana pola patronase dan klientelisme yang dijalankan oleh purnawirawan TNI dalam memenangkan pemilu legislatif di Kota Banjar Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan menggali lebih jauh terhadap fenomena patronase dan klientelisme yang dilakukan purnawirawan. Hasil penelitian menunjukkan, dijalankannya pola patronase dan klientelisme oleh para purnawirawan. Pola patronase sebatas pada pemberian pribadi (individual gift) dan politik 'gentong babi' (pork barrel). Selain pola patronase, pola klientelisme juga masih menjadi idola mereka untuk memobilisasi massa pada setiap sosialisasi/kampanye.

Kata kunci : Patronase; Klientelisme; Pemilu; Purnawirawan

Politics of Patronage and Clientelism of Retired TNI in The Legislative Election

Abstract

This research was motivated by the rise of retired military officers who became candidates in the DPRD Banjar City, West Java. The pattern of patronage and clientelism is still the idol of retired retainers to gain votes. They are still trapped in the pattern of patronage and clientelism which is often played by other civilian politicians. The purpose of this study is to see the extent to which patterns of patronage and clientelism run by retired TNI officers in winning legislative elections in Banjar City, West Java. This research was conducted in Banjar City, West Java Province, using a qualitative approach. This research will explore further the patronage and clientelism phenomena that retired retired. The results showed that the pattern of patronage and clientelism was carried out by retired retainers. The patronage pattern is limited to the individual gift and the pork barrel. In addition to the patronage pattern, the clientelism pattern is also still their idol to mobilize mass in every campaign / campaign

Keyword: Patronage; Clientelism; Elections; Retired Officers

PENDAHULUAN

Pesta demokrasi tahun 2019 sudah di ambang pintu. Ramai partai politik bekerja untuk dapat memenangkan kontestasi lima tahunan tersebut. Setiap partai bekerja keras untuk menyusun strategi guna mencari massa dan memobilisasi pendukung. Sementara masing-masing Caleg, mulai bergerilya /berusaha mendekati masyarakat guna mendulang suara. Mereka terjun langsung ke masyarakat terutama kelompok *grass root* yang merupakan basis masa yang besar. Semua kandidat meyakini bahwa bahwa strategi ini lebih efektif ketimbang membagi-bagikan kaos secara gratis atau memasang baliho dan spanduk.

Pertemuan dengan pola silaturahmi dilakukan para caleg secara kontinyu dimulai dari awal masa kampanye, mereka mendatangi kelompok masyarakat yang berada di perkotaan, desa sampai wilayah perbatasan. Dari mulai mendatangi tokoh agama, tokoh masyarakat, para kelompok masyarakat hingga pesantren-pesantren. Penggunaan strategi silaturahmi oleh kandidat dipandang sebagai produk dan interaksi antara institusi formal dan informal (North 1990 dan lauth 2005 dalam Paskarina dalam (Aspinall & Sukmajati, 2015)

Demikian juga yang dilakukan oleh Calon Legislatif yang berasal dari Purnawirawan TNI di Kota Banjar, Jawa Barat. Mereka adalah para pendatang baru dalam dunia perpolitikan di Kota Banjar. Baru sekitar setahun mereka bergabung dengan parpol. Masuknya para purnawirawan TNI dalam perpolitikan di Kota Banjar Jawa Barat menjadi suatu tanda tanya besar, mengapa mereka masuk pada saat partai sedang membutuhkan pemenuhan kuota calon

legislatif di setiap daerah pemilihan yang akan didaftarkan ke KPU pada Pemilu legislatif tahun 2019. Apakah ini menandakan bahwa terdapat pola pragmatis yang dimainkan oleh partai politik untuk meraup suara pada pemilu legislatif di Kota Banjar. Mereka merupakan kader baru, akan tetapi langsung dipasang oleh DPC/DPD masing masing partai sebagai calon legislatif.

Masuknya militer dalam dunia politik juga menjadi perdebatan di negara-negara berkembang misalnya dari ahli yang mengatakan, masuknya purnawirawan militer ke dalam politik juga terjadi di negara-negara lain dengan tujuan untuk dapat mempengaruhi kebijakan politik (Becker, 2001), (Janowitz, 1960). Argumentasi lain menyatakan bahwa masuknya purnawirawan TNI dalam politik merupakan bagian dari upaya institusi militer menguasai pemerintahan melalui mekanisme demokrasi, atau disebut juga dengan remilitarisasi, (Adejumobi, 1999) (Alagappa, 2001) (Winichakul, 2008)

Dalam konteks ke Indonesiaan, semenjak pemilu tahun 1999 sampai dengan pemilu saat ini, sudah banyak purnawirawan yang masuk pada politik praktis, mereka menjadi anggota partai, baik pada tingkat pusat sampai dengan tingkat lokal, dan mereka tidak membawa institusi militer sebagai atribut mereka, mereka murni membawa kepentingan individu guna dapat menjalankan politiknya.

Akan tetapi fenomena masuknya purnawirawan TNI ke ranah politik salah satunya disebabkan oleh lemahnya sistem rekrutmen partai, serta inkompetensi politisi sipil. Selain itu dikarenakan purnawirawan memiliki jaringan dan modal Sosial (*Sosial Capital*), sehingga partai

politik mengambil langkah pragmatis merekrutnya. Politisi sipil mendorong politisi purnawirawan TNI untuk menerapkan kapabilitasnya dalam bidang militer, seperti penguasaan teritorial, guna mendulang suara dalam pemilu. Strategi yang diterapkan purnawirawan TNI patut dicontoh, karena mereka ahli dalam menjalankan organisasi dan memiliki jaringan sosial yang luas, yang berasal dari aktifitas mereka ketika bekerja dahulu.

Sayangnya dalam usaha untuk mendulang suara, salah satu pola yang dijalankan oleh para purnawirawan tersebut adalah memainkan model klintelisme dan patronase, hal ini disebabkan karena pada saat mereka aktif di militer, rata-rata mereka menduduki jabatan di Kodim sebagai anggota intelijen dan Babinsa sehingga mereka memiliki jaringan yang luas dan banyak terdapat mantan masyarakat di daerah binannya yang menjadi klien mereka. Inilah warisan dari kinerja mereka selama bekerja di militer di mana dapat membentuk pola klintelisme.

Di Kota Banjar, Jawa Barat, terdapat 4 orang Purnawirawan TNI yang menjadi Caleg DPRD Kota Banjar tahun 2019, mereka berasal dari partai yang berbeda dan daerah pemilihan yang berbeda pula.

Tabel 1. Calon Legislatif DPRD Kota Banjar Jawa Barat, yang Berasal dari Purnawirawan TNI

No	Nama	Asal partai	Daerah Pemilihan
1	Peltu (Purn) Kasnap	Partai Gerindra	Kec Banjar&Purwaharja
2	Pelda (Purn) Dalijo,S.IP.,M.Si	PDIP	Kec Pataruman
3	Serma (Purn) Gunadi	PBB	Kec Pataruman
4	Peltu (Purn) Sudarto	Golkar	Kec Langensari

Sumber : KPUD Kota Banjar 2018

Kondisi politik di kota Banjar menjadi sangat unik, karena terdapat 4 orang purnawirawan TNI yang masuk /bergabung dengan partai politik pada saat partai politik membutuhkan beberapa calon legislatif untuk memenuhi kuota setiap daerah pemilihan. Keunikan juga terlihat, bahwa dari beberapa wilayah di Jawa Barat, hanya Kota Banjar saja yang menunjukkan tingginya minat politik para purnawirawan TNI untuk berjuang menjadi legislatif di DPRD Kota Banjar, Sementara di daerah lain di wilayah priangan Timur Jawa Barat, tidak ada mantan dari militer khususnya yang akan menjadi anggota legislatif di kabupaten/kota.

Urgensi permasalahannya dapat dikatakan bahwa purnawirawan yang menjadi kandidat legislatif, terjebak dalam politik Patronase dan klientelisme di daerah, mereka tidak bisa keluar dari arus utama politisi sipil lainnya, ini menandakan bahwa partai politik sangat lemah dalam menjalankan proses perekrutan. Selain itu masuknya purnawirawan TNI ke ranah politik salah satunya disebabkan oleh lemahnya sistem rekrutmen partai, serta masih tingginya kepercayaan masyarakat terhadap purnawirawan untuk memimpin. Partai politik menganggap purnawirawan memiliki jaringan dan modal Sosial (*Sosial Capital*) (Marijan, 2010), sehingga partai politik mengambil langkah pragmatis merekrutnya. Politisi sipil memberikan celah bagi bergabungnya purnawirawan TNI untuk bergabung dalam partai politik. Dengan bergabungnya mereka, diharapkan dapat menerapkan kapabilitasnya dalam bidang militer pada politik, seperti penguasaan teritorial, kemampuan agitasi, kemampuan mengajak dan mampu menggerakkan

kliennya guna untuk mendulang suara dalam pemilu.

Sejauh ini studi mengenai politik dan patronase dalam pemilu legislatif telah dilakukan akan tetapi sebagian besar berfokus pada pola patronase di lakukan oleh individu atau pribadi (Pratama, 2017), (Aspinall & Sukmajati, 2015). Dalam hal ini penelitian yang akan dibuat tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya, tetapi akan difokuskan pada pola patronase dan klientalisme yang dilakukan oleh purnawirawan TNI yang mengikuti kontestasi politik legislatif tahun 2019.

Terdapat beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya. *Pertama*, peneliti berpendapat masih sedikit penelitian politik yang berfokus pada politik patronase dan klientalisme purnawirawan TNI. *Kedua*, peneliti berpendapat bahwa masih sedikit penelitian yang mengkaji pola politik yang dilakukan oleh purnawirawan TNI pada kemenangan pemilu legislatif. *Ketiga*, penelitian ini akan mengupas secara global pada politik patronase dan klientalisme purnawirawan TNI. Penelitian ini berusaha mengisi celah yang kosong pada politik patronase dan klientalisme di Indonesia.

Dari pemaparan permasalahan di atas, maka penelitian akan mencari secara lebih mendalam pola patronase dan klientalisme yang dijalankan oleh purnawirawan TNI dalam memenangkan pemilu legislatif di Kota Banjar Jawa Barat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana pola patronase dan klientalisme yang dijalankan oleh purnawirawan TNI dalam memenangkan pemilu legislatif di Kota Banjar Jawa Barat.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Penelitian kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya guna memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa tak memerlukan kuantifikasi, atau karena gejala-gejala tersebut tak memungkinkan diukur secara tepat (Abercrombie, Nicholas, Hill, & Tumer, 1984).

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Untuk menyajikan data tersebut agar lebih bermakna dan mudah dipahami adalah menggunakan *interactive model analysis* dari (Milles, Huberman, & Saldana, 2014) Gambar analisis data model interaktif Sumber : Milles dan Huberman. Dalam model ini kegiatan analisis dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Patronase dalam Politik Lokal

Patronase merupakan bagian dari politik uang yang dimainkan oleh para kandidat untuk memenangi pemilihan. Istilah politik uang telah secara luas digunakan untuk menggambarkan praktek-praktek penggunaan uang dalam pemilihan umum. Namun demikian, kurang lebih satu dekade setelah pemilihan umum pasca reformasi, istilah politik uang untuk menggambarkan praktik yang merujuk pada distribusi uang (uang tunai dan terkadang dalam

bentuk barang) dari kandidat kepada pemilih di saat pemilu (Aspinall & Sukmajati, 2015).

Adapun pengertian dari patronase jika merujuk pada Shefter, sebagai pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka (Shefter, 1994) lihat juga (Hutchcroft, 2014). Sedangkan (Muller, 2014) mendefinisikan patronase sebagai penggunaan sumber daya publik dalam pertukaran partikularistik dan langsung antara klien dan politisi partai atau fungsionaris partai. Yang dimaksud langsung adalah bahwa, politisi dapat secara langsung mendatangi kliennya secara individu dan terlibat dalam hubungan pertukaran, politisi menyediakan barang dan jasa untuk ditukar dengan dukungan.

Variasi patronase dari (Aspinall & Sukmajati, 2015) terdiri atas *Pertama*, Pembelian suara (*vote buying*), dapat diartikan sebagai distribusi pembayaran uang tunai/barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan yang implisit bahwa para penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si pemberi. *Kedua*, Pemberian -pemberian pribadi (*individual gift*). Agar mendukung terhadap pembelian suara yang lebih sistematis, para kandidat seringkali memberikan berbagai pemberian pribadi kepada para pemilih. Praktek ini dilakukan saat bertemu dengan pemilih, baik saat bertemu kunjungan ke rumah-rumah atau saat kegiatan kampanye. Pemberian tersebut kadangkala disamarkan menjadi

pemberian sebagai kenang-kenangan, ini dilakukan untuk mepererat hubungan sosial. *Ketiga*, Pelayanan dan aktifitas (*services and activities*), seperti pemberian uang tunai, kandidat seringkali menyediakan atau membiayai aktivitas yang sangat umum seperti kampanye pada acara perayaan oleh komunitas tertentu. misalnya calon legislatif membiayai turnamen bola atau bola voli dan lain sebagainya. *Keempat*, Barang-barang kelompok (*club good*). Di mana bentuk patronase yang diberikan untuk keuntungan bersama bagi kelompok sosial tertentu. misalnya pemberian dari kandidat berupa perlengkapan ibadah, peralatan olahraga, alat musik, *sound system*, peralatan dapur, tenda dan lain sebagainya. Atau kandidat memberikan sumbangan pembangunan atau renovasi infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti pembangunan musholla, jembatan dan lain sebagainya. *Kelima*, Proyek gentong babi (*pork barrel project*) bentuk patronase yang sedikit berbeda, yaitu proyek proyek pemerintah yang ditujukan untuk wilayah geografis tertentu. Sebagaimana layaknya para calon legislatif banyak yang menjanjikan akan memberikan 'program-program' dan 'proyek-proyek' yang didanai dengan dana publik untuk konstituen mereka yang biasanya berupa proyek-proyek berskala kecil di masing-masing daerah pemilihan.

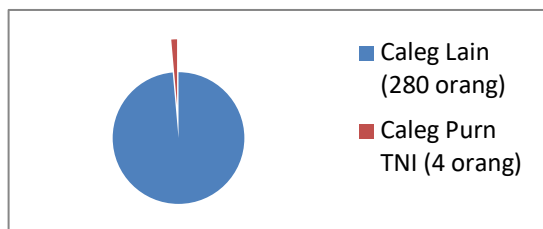
Politik Patronase Purnawirawan

Setiap bakal calon legislatif memiliki metode dan cara tersendiri guna mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya. Tidak terkecuali purnawirawan TNI yang menjadi calon anggota dewan Kota Banjar, mereka turut serta dalam

memobilisasi massa guna mendulang suara. Nampaknya tidaklah salah partai dalam merekrut mereka, karena keahliannya dalam penguasaan teritorial, kemampuan mempengaruhi, agitasi, dan bahkan memiliki jumlah klien yang cukup banyak yang bisa dijadikan sebagai pengumpul suara.

Di kota Banjar, Jawa Barat, terdapat 4 orang Caleg yang berasal dari purnawirawan TNI, atau sekitar 1,4% dari total 284 caleg secara keseluruhan.

Grafik 1. Caleg Purnawirawan TNI, di Kota Banjar, Jawa Barat



Sumber : KPUD Kota Banjar, Jawa Barat 2019

Perilaku Caleg di Kota Banjar yang berasal dari purnawirawan TNI ternyata terjebak dalam arus utama patronase yang dijalankan rekan rekan sipil lainnya sesama calon legislatif. Mereka juga menjalankan model patronase, hanya saja pada tingkatan yang berbeda. Perilaku ini disebabkan karena masih minimnya pengalaman politik bagi purnawirawan, selain itu, latar belakang pekerjaan saat masih di militer, sebagai (Babinsa), turut membawa model patronase tersebut. Setiap Babinsa harus bersikap humanis terhadap masyarakat, guna menarik simpati masyarakat. Salah satunya adalah dengan sikap selalu berbuat/ mambantu masyarakat, implementasinya yaitu dengan sikap memberi kepada

masyarakat.¹ Pola ini terbawa hingga mereka menjadi purnawirawan.

Bentuk patronase yang dijalankan oleh Caleg purnawirawan di Kota Banjar hanya terkonsentrasi pada Pemberian-pemberian pribadi (*individual gift*) dan model gentong babi (*pork barrel project*), pola ini dijalankan oleh para Caleg purnawirawan guna mendulang suara di daerah pemilihan.

Bagi para purnawirawan, mobilisasi massa saat kampanye tidaklah terlalu sulit dilakukan, mengingat dulunya mereka pernah bekerja sebagai intelijen dan Babinsa Kodim di daerah Banjar, Jawa Barat. Para Purnawirawan tersebut sudah banyak mengenal masyarakat Kota Banjar. Kondisi ini sangat menguntungkan mereka, di mana pada masa kampanye, para purnawirawan berkeliling ke masyarakat, dan mengumpulkan warga. Pada saat itulah di dalam acara kumpul warga, diselipi kegiatan pembagian kaos, pembagian cindramata, dan kartu nama.

Pemberian kartu nama dan kaos saat mensosialisasikan diri merupakan bagian dari kegiatan patronase dalam bentuk pemberian pribadi. Pola yang dijalankan tersebut memang tidak dilarang Bawaslu, akan tetapi, pola ini sedikit tidaknya merusak nilai-nilai demokrasi. Bagaimana mungkin sebuah pemberian tanpa ada imbal balik dari si pemberi, apalagi disaat sedang berjalannya proses kontestasi politik. Sudah barang tentu ada sesuatu yang diharapkan dari para Caleg tersebut.

Selain pemberian kaos ternyata ada pola lain yang dijalankan oleh salah

¹ Wawancara dengan bapak Kasnap, Caleg Purnawirawan TNI, di Kota Banjar, pada 25 Februari 2019

satu Caleg purnawirawan TNI. Seorang caleg Purnawirawan TNI memiliki seperangkat *sound system*, yang biasa disewakan pada saat acara hajatan. Akan tetapi disaat masa kampanye sekarang ini, dengan sukarela memberikan pinjaman bagi warganya yang membutuhkan, khususnya saat kegiatan perkawinan atau sunatan tanpa meminta imbalan apapun. Ini salah satu *service* yang diberikan Caleg Purnawirawan dalam mendulang suara. Pemberiannya tidak hanya berupa barang, tetapi memberikan pinjaman pada perorangan bagi yang membutuhkan *sound system*.²

Ada juga seorang Caleg Purnawirawan yang memiliki kendaraan pribadi, dan pada saat kampanye, kendaraan tersebut dipinjamkan kepada masyarakat di Dapilnya, untuk membantu mereka yang akan ke Rumah Sakit dan Puskesmas.

Para Caleg tersebut memberikan dan meminjamkan barang miliknya tanpa rasa canggung, ini adalah salah satu pendekatan guna mendulang suara, tetapi dengan biaya yang murah. Nampaknya mereka tidak menjalankan bentuk pemberian yang lain, seperti pemberian untuk kelompok, pembiayaan aktifitas, atau memberi uang secara langsung kepada masyarakat/konstituennya, mengingat mereka adalah Caleg dengan modal yang sedikit.

Caleg Purnawirawan TNI di Kota Banjar memang tidak memiliki modal yang besar untuk dapat diberikan ke masyarakat, sehingga pola pemberian Barang-barang kelompok (*club good*),

atau pemberian melalui aktifitas tidak dijalankan.

Bagi para Caleg purnawirawan dengan modal pas-pasan, maka cara yang jitu bagi mereka adalah memberikan sesuatu kepada para konstituen tidak dengan nilai yang besar, cukup dengan memberikan kaos dan kartu nama saja, sehingga para konstituen tetap ingat kepada mereka.

Selain pola pemberian secara pribadi kepada konstituennya, ternyata para purnawirawan juga menjalankan pola 'gentong babi', di mana mereka menjanjikan kepada masyarakat untuk program yang akan diberikan bila mereka sudah menjadi anggota dewan. Sebagai contoh seorang purnawirawan dalam kampanyenya pernah menjanjikan kepada masyarakat di daerah pemilihannya, jika terpilih maka akan mengajukan proyek pompa air, karena di daerah tersebut memang kesulitan air. Dampaknya ternyata masyarakat sangat antusias dengan kampanye tentang program yang dijanjikan oleh Caleg tersebut.³

Mereka melakukan ini karena mencontoh para petahana yang menjalankan pola yang sama. Jadi pola imitasi Caleg purnawirawan, terhadap Caleg petahana dilakukan karena mereka minim pengalaman politik. Dan ada anggapan bahwa pola tersebut merupakan pola yang jitu dalam mendulang suara.

Caleg Purnawirawan di Kota Banjar rata-rata baru bergabung ke partai sekitar 2 (dua) - 4 (empat) bulan sebelum partai mendaftarkan bakal calon legislatifnya ke

² Wawancara dengan Bapak Dalijo, di Kota Banjar, pada 28 Februari 2019

³ Wawancara dengan Bapak Dalijo, di Kota Banjar, pada 28 Februari 2019.

KPU.⁴ Jika dilihat memang sangat miris, dapat dibayangkan mereka para purnawirawan yang merupakan para pendatang baru di dunia politik, langsung dimasukan dalam daftar Caleg. Sehingga tidaklah salah bila mereka menerapkan pola kampanye yang sama dengan para politisi senior lainnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masing-masing Caleg tersebut ternyata mulai terjebak dalam pola patronase, hal ini dilakukan mengingat mereka tidak mengetahui bahwa pola tersebut merupakan bentuk lain dari patronase. Yang mereka tahu adalah pemberian uang saja yang dilarang karena merupakan pembelian suara. Pola patronase memang lazim terjadi di negara lain dengan intensitas yang berbeda, pola ini dapat menghambat terhadap demokrasi yang baik.

Pada akhirnya harus diperhatikan bahwa program pendekatan kesejahteraan sosial untuk kampanye politik yang disampaikan di atas tidak hanya mendatangkan suara. Implementasinya juga dapat menciptakan mesin politik.

Bagaimanapun, patronase politik menjadi bentuk yang eksis dilakukan di Kota Banjar, para purnawirawanpun tanpa canggung melakukannya, walaupun dalam pola yang lebih ringan yaitu pemberian pribadi dan gentong babi (*pork barrel*).

Politik Klientelisme para Purnawirawan di Tataran Lokal .

Secara harfiah istilah klientelisme berasal dari kata “cluere” yang artinya adalah “men-dengarkan atau mematuhi”.

Kata ini muncul pada era Romawi kuno yang menggambarkan relasi antara “clientela” dan “patronus”. “Clientela” pada era ini adalah istilah untuk menyebut kelompok orang yang mewakili suaranya kepada kelompok lain yang disebut “patronus”, yang merupakan sekelompok aristokrat. Selanjutnya, disebutkan bahwa “clientela” merupakan pengikut setia dari “patronus” (Muno, 2010).

Konsep klientelisme sering ditempatkan dalam posisi yang memiliki arti berbeda dengan patronase (*patronage*). Konsep patronase didefinisikan sebagai relasi dua arah ketika seorang yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan pada orang lain yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih rendah (klien) yang memberikan dukungan dan bantuan kepada patron (Scott, 1972).

Klientelisme adalah jaringan antara orang-orang yang memiliki ikatan sosial, ekonomi dan politik yang didalamnya mengandung elemen iterasi, *status inequality* dan resiprokal (TOMSA & Ufen, 2012). Kemudian, klientelisme juga adalah relasi kuasa antara patron dan klien yang bersifat personalistik, resiprositas, hierarkis dan iterasi. Maka dapat dipastikan bahwa klientelisme berbicara tentang jaringan atau relasi. Jaringan tersebut mengandung relasi kuasa yang tidak setara dimana patron memiliki kuasa penuh terhadap jaringan tersebut. Dalam kajian politik, klientelisme diartikan sebagai jaringan yang dikuasai patron

⁴ Wawancara dengan bapak Sudarto, Caleg Purnawirawan TNI, dari Golkar, di Banjar, tanggal 28 februari 2019.

untuk mengintervensi kliennya (Aspinall & Sukmajati, 2015).

Klintelisme merupakan suatu pola hubungan antara patron dan klien, di mana patron dapat memperoleh dukungan politis dari klien, hal ini terjadi karena adanya hubungan yang baik antara patron dan klien, dalam jangka waktu yang lama. Klientelisme dijalankan untuk menghubungkan perwakilan politik dengan warga negara, dan menjadi mekanisme untuk layanan konstituen (Hopkin, 2006).

Pola yang dijalankan oleh Caleg purnawirawan pada Pileg 2019 di Kota Banjar, yaitu dengan menghubungi kembali teman-temannya saat mereka bertugas di Kodim Ciamis. Mereka mengontak para klien saat mereka bertugas di militer. Warga sipil yang dulunya dijadikan sebagai informan, sekarang kembali sebagai orang-orang yang mesti mensosialisasikan dirinya. Tanpa ada paksaan ternyata kliennya tersebut mau membantu Caleg. Hal ini terjadi dikarenakan adanya hubungan yang dekat sewaktu masih berdinis di militer.

Karena faktor hutang budi terhadap para purnawirawan di saat berdinis dulu, maka dengan sukarela beberapa warga mensosialisasikan caleg purnawirawan. Melihat kondisi tersebut seolah sudah terbentuk Patron dan klien. Purnawirawan sebagai patron dan warga masyarakat menjadi kliennya.

Pola pembentukan klientelisme oleh purnawirawan, dikarenakan kedekatannya sewaktu masih berdinis. Mereka rata-rata merupakan mantan orang dekat di desa, yang dijadikan penyokong/pemberi informasi sewaktu masih bekerja sebagai Babinsa atau Intel. Semasa mereka berdinis, mereka

memiliki banyak jaring di desa, yang berguna untuk melaporkan segala sesuatu yang terjadi di daerahnya. Karena hubungan yang baik di antara mereka, akhirnya terbentuklah pola patron dan klien, di mana purnawirawan menjadi patron dan mantan jaringnya menjadi klien. Hubungan mereka terkadang melebihi seperti keluarga, karena ada pola memberi dan menerima di antara mereka ketika bertugas.

Pada saat sekarang, para klien tersebut membantu mantan patronnya untuk mensosialisasikannya sebagai Caleg. Pola ini sangat efektif karena klien tersebut rata-rata tokoh di suatu daerah, baik tokoh pemuda atau tokoh masyarakat. Kondisi ini semakin mempermudah sosialisasi, dan melebar-kan jaringan dalam kampanye. Dengan demikian akan semakin banyak masyarakat yang mengenal terhadap Caleg tersebut, karena para klien bisa masuk ke dalam pusat lingkaran masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Terdapat beberapa temuan mengenai perilaku yang dilakukan purnawirawan TNI dalam mendulang suara pada Pileg 2019 di Kota Banjar, Jawa Barat. Pola patronase dan klientelisme masih menjadi idola para purnawirawan untuk mendulang suara. Mereka masih terjebak pada pola patronase dan klientelisme yang banyak dimainkan oleh politisi sipil lainnya.

Pola patronase dijalankan oleh mereka sebatas pada pemberian pribadi (*individual gift*), pola ini dilakukan pada saat sosialisasi di masyarakat, setelah kegiatan mereka biasanya memberikan

sesuatu seperti kartu nama dan kaos, selain itu ada juga yang memberikan pinjaman barang seperti *sound system* yang dapat digunakan oleh masyarakat di dapilnya untuk kegiatan sunatan dan perkawinan, bahkan ada juga yang memberikan pinjaman mobil pribadi yang dapat dijadikan alat transportasi yang membutuhkan bila akan ke rumah sakit.

Selain itu pola 'gentong babi' (*pork barrel*) masih menjadi idola yang dijadikan suatu pendekatan. Banyak janji yang diberikan kepada masyarakat terkait pemberian program bila mereka telah jadi anggota dewan. Pola yang dilakukan oleh Caleg tersebut nampaknya berhasil sebagai alat mobilisasi massa.

Selain pola patronase di atas, mereka juga menjalankan pola klientelisme, di mana menggunakan para mantan informan di desa guna mensosialisasikan dirinya yang menjadi Caleg. Pola pembentukan klientelisme oleh purnawirawan, rata-rata mantan orang dekatnya di desa, yang dijadikan penyokong /pemberi informasi sewaktu masih bekerja sebagai Babinsa atau Intel. Semasa mereka berdinass, mereka memiliki banyak jaring di desa, yang berguna untuk melaporkan segala sesuatu yang terjadi di daerahnya. Dengan hubungan yang baik antara mereka akhirnya terbentuklah pola patron dan klien, di mana purnawirawan menjadi patron dan mantan jaringnya menjadi klien. Hubungan mereka terkadang melebihi seperti keluarga, karena ada pola memberi dan menerima di antara mereka ketika bertugas. Pola ini menjadi salah satu yang dijalankan karena berbiaya murah dan menjadi salah satu 'alat' guna

masuk kepusaran masyarakat untuk mensosialisasikan dirinya.

Saran

Politik patronase dan klientelisme tidak disadari dapat merusak substansi dari demokrasi, Hampir seluruh elit memiliki pemahaman yang sama bahwa hanya politik pembelian suara saja yang tidak dibolehkan, padahal pembelian suara (*vote buying*) merupakan salah satu jenis patronase. Padahal masih ada jenis pola patronase dan klientelisme yang lainnya yang tidak diketahui oleh mereka. Untuk itu perlu ada pemberian pemahaman kepada partai politik dan para elit di daerah, bahwa politik patronase dan klientelisme banyak macamnya dan bila dijalankan bisa berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia.

Untuk menambah khasanah keilmuan tentang politik patronase dan klientelisme, maka disarankan agar lebih memperluas lagi penelitian dalam bidang tersebut. Salah satunya adalah mencari penyebab mengapa politikus purnawirawan menjalankan pola patronase dan klientelisme, yang sama dengan politikus lainnya dalam mendulang suara dan memobilisasi massa, padahal mantan purnawirawan tersebut sudah memiliki jaringan teritorial yang kuat di daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abercrombie, Nicholas, Hill, S., & Tumer, B. S. (1984). *Dictionary of Sociology*. London: Penguin Books.
- Adejumobi, S. (1999). Privatisation policy and the delivery of social welfare services in Africa: A Nigerian example. *Journal of Social Development in Africa*, 14(2), 87-108.
- Alagappa, M. (2001). *Coercion and governance: the declining political*

- role of the military in Asia*. Stanford University Press.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientalisme pada pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: PolGov.
- Becker, W. R. (2001). *Retired Generals and Partisan Politics: Is A Time Out Required? Strategy Research Project*. Pennsylvania: US Army War College, Carlisle Barracks.
- Creswell, W. J., Clark, V. L., & Plano. (2007). *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. Thousand Oaks, CA: Thousand Oaks, CA.
- Hopkin, J. (2006). Clientelism and party politics. *Handbook of Party Politics*, 406-412.
- Hutchcroft, P. D. (2014). Linking Capital and Countryside: Patronage and Clientelism in Japan, Thailand, and the Philippines. *Clientelism, Social Policy and the Quality of Democracy*, 174-203.
- Janowitz, M. (1960). *The Professional Soldier: A Social and Political Portrait*. New York: The Free Press.
- Marijan, K. (2010). *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Milles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. *Arizona State University: SAGE*.
- Muller, W. C. (2014). *Patronase Partai Dan Kolonisasi Partai Atas Negara, dalam Richard S. Katz & William Crotty. "Handbook Partai Politik"*. Bandung: Nusamedia.
- Muno, W. (2010). Conceptualizing and Measuring Clientelism. *GIGA Working Papers*, (23), 1-26.
- Pratama, R. A. (2017). PATRONASE DAN KLIENTALISME PADA PILKADA SERENTAK KOTA KENDARI TAHUN 2017. *Wacana Politik*, 2(1), 33-44.
- Scott, J. C. (1972). Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia. *American Political Science Review*, 66(01), 91-113. <https://doi.org/10.2307/1959280>
- Shefter, M. (1994). *Political Parties and the State: The American Historical Experience*. Princeton: Princeton University Press.
- Tomsa, A. D., & Ufen, A. (2012). Introduction: party politics and clientelism in Southeast Asia. In *Party Politics in Southeast Asia* (pp. 19-37). Routledge.
- Winichakul, T. (2008). Toppling democracy. *Journal of Contemporary Asia*, 38(1), 11-37.

Profil Singkat

Teguh Anggoro, saat ini menjadi dosen pada STISIP Bina Putra Banjar Jawa Barat. Saat ini tercatat menjadi mahasiswa S3 pada Jurusan Doktor Politik di Universitas Padjadjaran. Fokus kajian yakni politik pemerintahan.